



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 24 JUNI 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Masuk Dalam Skala Prioritas Tahun 2025, Pemdes Sedati Gede Bangun Rumah Pompa

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Setelah dilakukan Penetapan Peraturan Desa tentang rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 yang lalu dan telah di sepakati antara Kepala Desa dengan BPD serta di tuangkan di dalam APBDes, Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi/papan Informasi yang mudah di ketahui oleh masyarakat.

Sedangkan di dalam Substansi APB Desa 2025 salah satunya yaitu memuat rencana belanja desa untuk masing-masing program dan kegiatan diantaranya meliputi Sub Bidang Penanggulangan Bencana, oleh karenanya di bidang Penanggulangan bencana pemerintah Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati membuat rumah pompa guna mengantisipasi adanya banjir yang menggenangi area pemukiman warga di saat musim hujan.

Kepala desa Sedati Gede Muhammad Nasruddin saat memberikan keterangan kepada jurnalis pojok kiri rabu (24/6) menyampaikan, "program kerja yang masuk di dalam skala prioritas yang sudah di tetapkan di dalam APBDes dan masuk di dalam substansi penanggulangan bencana ialah membuat rumah pompa" Katanya.

"Kenapa pembuatan rumah pompa masuk dalam rencana program kerja kita dan masuk didalam skala prioritas, karena di wilayah tersebut padat pemukiman sehingga menjadikan area pemukiman (Drainase) fungsinya kurang maksimal di saat menampung air di musim penghujan, oleh karena itu kalau ada hujan turun wilayah tersebut sering tergenang air, maka dari itu kita (Pemerintah Desa) bersama dengan BPD sepakat untuk membuat Rumah Pompa dan guna menanggulangi air hujan di saat menggenangi area pemukiman



warga" Tambahnya.

"Pembangunan rumah pompa tersebut selain masuk di program kerja kita di tahun 2025, juga Sesuai dengan misi saya sebagai kepala Desa, dengan adanya rumah pompa tersebut tentunya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar, diantaranya yaitu Meminimalisir genangan

air agar masyarakat tidak lagi merasakan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan, serta memperpanjang usia infrastruktur seperti Jalan, drainase, jembatan dan sebagainya, sedangkan untuk pekerjaannya kita melibatkan masyarakat lokal guna mengurangi kesenjangan sosial," tutupnya. (Nang)

GEMPUR ROKOK ILEGAL: WAKIL BUPATI SIDOARJO PIMPIN PEMUSNAHAN JUTAAN BATANG ROKOK ILEGAL SENILAI RP13,5 MILIAR DI SIHT PORONG



Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kantor Bea Cukai Sidoarjo secara tegas menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Hari ini, Rabu 24 Juni, komitmen itu coba diwujudkan dalam aksi nyata. Pemusnahan rokok ilegal, edukasi penanganan BKC ilegal, sekaligus dalam rangka pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026.

Acara ini secara seremonial dilaksanakan di Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Sidoarjo, Desa Tambakuri, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu (24/06/2026). Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj Mimik Idayana, serta dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik serta Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan.

Komitmen Bersama dan Penguatan SIHT Sidoarjo
Selain sebagai wujud penguatan

kan hukum, kegiatan pemusnahan juga dimanfaatkan secara baik oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.A.P. untuk memperkenalkan fungsi strategis SIHT Sidoarjo kepada masyarakat dan pelaku industri Hasil Tembakau khususnya.

Disampaikan bahwa SIHT merupakan bentuk perlakuan khusus (afirmasi) dari Pemerintah untuk membantu para pelaku usaha hasil tembakau dengan regulasi yang ada. Misalnya terkait pengurusan izin usaha dan izin di bidang cukai, pendampingan proses bisnis hingga dukungan pemasaran.

Keberadaan SIHT merupakan upaya menekan peredaran rokok ilegal, memberdayakan IKM dan upaya membangkitkan sentra ekonomi kerakyatan, serta upaya penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota sesuai regulasi.

"SIHT ini adalah solusi nyata. Kami tidak hanya menindak yang ilegal, tetapi juga merangkul dan membina para pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan memanfaatkan fasilitas di SIHT, mereka bisa legal, tenang

dalam berusaha, dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah," ujar Hj. Mimik Idayana, S.A.P.

Detail Barang Milik Negara (BMN) yang Dimusnahkan- Adapun rincian barang ilegal yang dimusnahkan adalah sebagai berikut: No Dasar Hukum Jml BMN Potensi Nilai Barang (Rp) Potensi Kerugian Negara (Rp) Hasil Tembakau (Batang)

1 Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-172/MK/KN/2026 tanggal 18 Mei 2026 7.093.920 10.534.471.200 6.864.183.401

2 Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-108/MK/KN.4/2026 tanggal 20 Mei 2026, 2.002.840, 2.984.117.400, 1.947.878.026 Jumlah 9.096.760, 13.518.588.600, 8.812.061.427

Selain pembakaran secara simbolis di SIHT Sidoarjo, seluruh barang bukti dimusnahkan secara menyeluruh menggunakan insinerator di PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi), Ngoro, Mojokerto dengan metode yang ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sampai tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Selain pembakaran secara simbolis di SIHT Sidoarjo, seluruh barang bukti dimusnahkan

secara menyeluruh menggunakan insinerator di PT PRIA (Putra Restu Ibu Abadi), Ngoro, Mojokerto dengan metode yang ramah lingkungan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku sampai tidak memiliki nilai ekonomis lagi.

Sinergi DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara Bea Cukai, Pemkab Sidoarjo, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui optimalisasi alokasi DBHCHT. Dana ini dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penegakan hukum, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, hingga jaminan kesehatan.

Pemerintah Daerah dan Bea Cukai mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menghentikan produksi maupun peredaran rokok ilegal (tanpa pita cukai, pita cukai palsu, atau pita cukai bekas). Pihak berwenang memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi konsumen dan menjaga penerimaan negara. (*)



Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Pastikan Ribuan Kursi SPMB Sistem Online Terbuka dan Akuntabel Tepis Isu Kursi Hilang

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo memberikan klarifikasi resmi sekaligus menggunakan Hak Jawab terkait beredarnya potongan berita dari media Kabar Rakyat berjudul "Ribuan Kursi SMP Negeri Sidoarjo Hilang di SPMB, Pengamat Minta Audit Menyeluruh".

Cuplikan informasi tersebut diunggah ulang (re-upload) melalui sebuah konten video oleh akun media sosial IG @pep3ng.tak berdasar masuk konten Hoax.

Gugatan Pilkades Balongdowo Mulai Disidangkan

Pembak Pastikan Pelantikan Kades Tetap 29 Juni



SIDOARJO - Sengketa Pilkades Balongdowo, Kecamatan Candi telah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Rencana sidang perdana kasus tersebut digelar hari ini (25/6). Hakim akan menghadirkan sejumlah saksi di persidangan.

Berdasar informasi, tidak hanya pelapor yang akan dihadirkan. Panitia pilkades juga mendapat undangan untuk hadir di persidangan. Hanya saja, jawabnya belum diketahui. Dalam gugatan, salah satu cakades Suparlan mengugut Ketua Panitia Pilkades Balongdowo, Ketua BPD Balongdowo, Camat Candi, dan Bupati Sidoarjo. Klaimnya, belum mengundurkan diri. Hal itu membuat pelaksanaan pilkades tak adil.

Sebanyak 80 kepala desa terpilih tetap akan dilantik sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni 29 Juni."

Agus Probo Sunarno Kepala Dinas PMD Sidoarjo

kades terpilih ditunda pada bupati. Ada surat yang dikirim. "Masih gugatan. Sehingga, kami ingin pelantikan diundur," katanya. Menurut Djupri, gugatan dilayangkan karena penetapan cakades terpilih dinilai cacat administrasi. Saat ditetapkan sebagai cakades, salah satu pendafatar belum mengundurkan diri. Hal itu membuat pelaksanaan pilkades tak adil.

Kades Terpilih Dilaporkan Polisi

Selain di Balongdowo, muncul masalah lain terkait pilkades di Sidoarjo. Cakades terpilih dilaporkan atas kasus penyerobotan tanah ke polisi. Saat ini, kasus ini masih ditangani aparat hukum.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDD) Sidoarjo Agus Probo Sunarno mengatakan, hingga saat ini tidak ada perubahan jadwal pelantikan. "Sebanyak 80 kepala desa terpilih tetap akan dilantik sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni 29 Juni," katanya.

Menurutnya, berbagai upaya hukum yang muncul tidak mengengaruhi agenda pelantikan. Probo menjelaskan, setiap keberatan terhadap hasil maupun proses pilkades memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. (tul/hen)

Penderita HIV Capai 7.129 Orang

DPRD Minta Kecamatan
Terlibat Pencegahan

SIDOARJO - Kasus HIV/AIDS di Sidoarjo terus melonjak. DPRD Sidoarjo meminta Pemkab untuk memperbanyak sosialisasi dan pencegahan. Upaya itu dilakukan dalam hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan puskesmas di Ruang Paripurna DPRD Sidoarjo kemarin (24/6).

Sekretaris Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Hinu Tri Sulistijorini mengatakan bahwa Jatim masih menjadi provinsi dengan

jumlah kasus HIV tertinggi di Indonesia. Sementara Sidoarjo berada di peringkat keempat tertinggi. "Kami masih di bawah Surabaya, Jember dan Tulungagung," katanya.

Dia menyebut jumlah kasus HIV di Sidoarjo mencapai 7.129 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.733 penderita masih hidup dan 396 orang lainnya meninggal dunia. Penyebaran kasus ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan.

Menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dia menganggap, HIV di Kota Delta



MUSYAWARAH: Hearing di DPRD terkait pencegahan dan penanganan HIV diikuti perwakilan OPD dan kecamatan.

seperti gunung es karena masih banyak penderita yang belum terdeteksi. "Kalau mau digencarkan lagi akan lebih banyak. Namun, masalahnya masyarakat menghindari dari pemeriksaan karena takut dengan

stigma," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori menjelaskan penanganan HIV tidak bisa hanya dibebankan kepada dinkes. Baginya, tingginya kasus HIV membutuhkan keterlibatan

lintas sektor mulai dari OPD, pemerintah kecamatan hingga masyarakat.

"Semakin banyak kasus ditemukan, semakin besar kebutuhan intervensi yang harus dilakukan," ujarnya. (ful/hen)



Omah Terapi-KU Buka Layanan ABK dari Keluarga Tak Mampu

SIDOARJO - Pusat pendampingan anak berkebutuhan khusus (ABK) Omah

Pekerja Sosial PPSAB Sidoarjo Prameitia Safitri menjelaskan, layanan untuk

sehari-hari dan kemandirian, sedangkan terapi wicara berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi.

Jawa Pos



TEGAS: Bupati Sidoarjo Subandi saat melihat salah satu proyek perbaikan jalan.

Bupati Prioritaskan Kontraktor Lokal Garap Proyek

KOTA-Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk mendorong keterlibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2026.

Langkah tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan ti-

dak hanya terlihat dari hasil fisik, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Subandi, paket-paket pekerjaan yang nilainya masih dapat dijangkau dan dikerjakan oleh pelaku usaha

lokal akan diprioritaskan bagi kontraktor asal Sidoarjo.

Dengan demikian, perputaran uang dari proyek pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha di daerah.

● Ke Halaman 10



Bupati Prioritaskan...

"Kita ingin perputaran ekonomi terjadi di Sidoarjo. Kalau pekerjaan itu mampu dikerjakan kontraktor Sidoarjo, kita upayakan dikerjakan oleh kontraktor Sidoarjo sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dari perputaran ekonomi dan pa-

jaknya," ujar Subandi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus memberikan kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha konstruksi daerah dalam mengambil peran pembangunan.

Meski demikian, Subandi menegaskan

kan bahwa prioritas terhadap kontraktor lokal tidak boleh mengesampingkan kualitas pekerjaan.

Seluruh proyek yang dibiayai melalui anggaran pemerintah harus dikerjakan secara profesional, sesuai spesifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa pemba-

ngunan yang dilaksanakan menggunakan dana publik sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk menjaga mutu pekerjaan.

"Mari bersama-sama membangun Sidoarjo dengan penuh amanah. Uang yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat sehingga harus di-

pertanggungjawabkan dengan baik," tegasnya.

Subandi berharap sinergi antara pemerintah, kontraktor, konsultan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Sidoarjo. (dik/vga)





Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Pastikan Ribuan Kursi SPMB Sistem Online Terbuka dan Akuntabel Tepis Isu Kursi Hilang

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo memberikan klarifikasi resmi sekaligus menggunakan Hak Jawab terkait beredarnya potongan berita dari media Kabar Rakyat berjudul “Ribuan Kursi SMP Negeri Sidoarjo Hilang di SPMB, Pengamat Minta Audit Menyeluruh”.

Cuplikan informasi tersebut diunggah ulang (re-upload) melalui sebuah konten video oleh akun media sosial IG @pep3ng.tak berdasar masuk konten Hoax.

Dinas Dikbud menyangkan tindakan pengunggahan ulang (re-upload) konten tersebut yang dilakukan tanpa adanya upaya konfirmasi (cover both side) kepada pihak Dinas Dikbud Kab. Sidoarjo

Hal ini berpotensi menimbulkan opini negatif, kegaduhan, serta kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya para orang tua wali murid yang sedang mengikuti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Dijelaskan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Netty Lastiningsih, M.Pd, “Tidak Ada Kursi Hilang: Dispendikbud menegaskan bahwa seluruh kuota daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo telah dihitung, direncanakan, dan dialokasikan secara transparan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis (juknis) PPDB/SPMB yang berlaku. Isu mengenai adanya ribuan kursi yang “hilang” adalah informasi yang keliru dan tidak berdasar.

Sistem SPMB Terbuka dan Akuntabel : Proses seleksi dilakukan melalui sistem daring (online) yang dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat luas. Setiap pergeseran, kuota jalur prestasi, zonasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua, semuanya tercatat secara sistematis di dalam database demi menjamin asas keadilan.

Menyangkan Minimnya Konfirmasi (Cover Both Side) “Kami sangat menyangkan sikap influencer atau pembuat konten yang langsung menyebarkan narasi sensitif tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Sidoarjo selaku pemangku kebijakan,” Ungkap Netty kepada media.

Plt Kepala Dinas Dikbud mengimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh digital (influencer), dan rekan-rekan media untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi seputar dunia pendidikan.

“Kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Namun, kami meminta agar setiap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang valid dan melalui proses konfirmasi yang berimbang (cover both side), agar tidak menciptakan keresahan sosial yang tidak perlu.” Tegas Netty. (Lie/Khol)



Kepala Desa Ketimang H Abdul Wahab foto bersama penerima BLT-DD dan didampingi Babinsa dan Babhinkamtibmas.

Pemdes Ketimang Wonoayu Salurkan BLT-DD 3 Bulan

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2026 kepada masyarakat yang berhak menerima.

Kegiatan yang dilaksanakan di pendopo desa, Rabu (24/6), dihadiri Pendamping Desa, BPD, Babinsa, Babhinkamtibmas, dan 33 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT-DD bulan April, Mei dan Juni 2026 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu kebutuhan dasar keluarga.

Kepala Desa Ketimang H Abdul Wahab menyampaikan, bantuan ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat,

khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Penetapan dan nominal yang diberikan kepada KPM merupakan hasil dari musyawarah desa yang telah disepakati bersama.

Para KPM bansos BLT-DD mempunyai syarat yang di antaranya, belum mendapatkan bantuan jenis lain dari pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya dari kementerian.

Tidak mudah mencari warga dengan kriteria seperti itu. Bahkan sebagian warga sudah mendapat bansos lain dari pemerintah, seperti PKH, BPNT, JPS dan BST.

H Abdul Wahab menambahkan, tujuan utama pemerintah menyalurkan bansos ini supaya benar-benar bermanfaat untuk warga. Sehingga warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya dukungan dan kesadaran bersama dalam penggunaan bantuan secara tepat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. (ld/jk/fer)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN
Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, PT. Oke Asset Indonesia akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, melalui jasa lelang PT Baital Lelang Tunjungan terhadap barang jaminan debitur atas nama KETUT BAYU WIRA DHARMA, dengan obyek lelang sbb: Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu di atasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik NIB. 12.39.000009919.0 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 03079), tercatat atas nama Nyonya TRESIA ANANTA, seluas 242 m2, terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Alamat: Jalan Lebak Arum VII No. 11, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Harga Limit: Rp1.423.000.000,- Uang Jaminan: Rp284.600.000,-
PETERANGAN

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT CAKRA RADHIKA UTAMA, Tertanggal 27 Mei 2026 Nomor: 17, dibuat dihadapan ACHMAD SYAHRANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, dinyatakan bahwa:

PT CAKRA RADHIKA UTAMA,
berkedudukan di Kota Surabaya,
DIBUBARKAN.

Segala pengajuan tagihan/keberatan dari kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diajukan secara tertulis dengan bukti yang sah ke Likuidator PT BINTANG RADHIKA UTAMA, Tuan HADI PRAYUGO, SE, dengan alamat Jalan Shopping Arcade The Bellezza Permata Hijau, Lantai GF, Unit GF1A, Jl.

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 16, dibuat di Kota Surabaya, dinyatakan

Segala pengajuan berkepentingan dapat diajukan ke PT BINTANG RADHIKA UTAMA

Masuk Dalam Skala Prioritas Tahun 2025, Pemdes Sedati Gede Bangun Rumah Pompa

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Setelah dilakukan Penetapan Peraturan Desa tentang rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2025 yang lalu dan telah di sepakati antara Kepala Desa dengan BPD serta di tuangkan di dalam APBDes, Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi/papan Informasi yang mudah di ketahui oleh masyarakat.

Sedangkan di dalam Substansi APB Desa 2025 salah satunya yaitu memuat rencana belanja desa untuk masing-masing program dan kegiatan diantaranya meliputi Sub Bidang Penanggulangan Bencana, oleh karenanya di bidang Penanggulangan bencana pemerintah Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati membuat rumah pompa guna mengantisipasi adanya banjir yang menggenangi area pemukiman warga di saat musim hujan.

Kepala desa Sedati Gede Muhammad Nasruddin saat memberikan keterangan kepada jurnalis pojok kiri rabu (24/6) menyampaikan” program kerja yang masuk di dalam skala prioritas yang sudah di tetapkan di dalam APBDes dan masuk di dalam substansi penanggulangan bencana ialah membuat rumah pompa” Katanya.

“Kenapa pembuatan rumah pompa masuk dalam rencana program kerja kita dan masuk didalam skala prioritas, karena di wilayah tersebut padat pemukiman sehingga menjadikan area pematusan (DRAINASE) fungsinya kurang maksimal di saat menampung air di musim penghujan, oleh karena itu kalau ada hujan turun wilayah tersebut sering tergenang air, maka dari itu kita (Pemerintah Desa) bersama dengan BPD sepakat untuk membuat Rumah Pompa dan guna menanggulangi air hujan di saat menggenangi area pemukiman



warga” Tambahnya.

“Pembangunan rumah pompa tersebut selain masuk di program kerja kita di tahun 2025, juga Sesuai dengan misi saya sebagai kepala Desa, dengan adanya rumah pompa tersebut tentunya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar, diantaranya yaitu Meminimalisir genangan

air agar masyarakat tidak lagi merasakan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan, serta memperpanjang usia infrastruktur seperti Jalan, drainase, jembatan dan sebagainya, sedangkan untuk pekerjaanya kita melibatkan masyarakat lokal guna mengurangi kesenjangan sosial,” tutupnya. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Gugatan Pilkades Balongdowo Mulai Disidangkan

**Pemkab Pastikan
Pelantikan Kades
Tetap 29 Juni**

SIDOARJO – Sengketa Pilkades Balongdowo, Kecamatan Candi telah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Rencananya, sidang perdana kasus tersebut digelar hari ini (25/6). Hakim akan menghadirkan sejumlah saksi di persidangan.

Berdasar informasi, tidak hanya pelapor yang akan dihadirkan. Panitia pilkades juga mendapat undangan untuk hadir di persidangan. Hanya saja, jadwalnya belum diketahui.

Dalam gugatan, salah satu cakades Suparlan mengugat Ketua Panitia Pilkades Balongdowo, Ketua BPD Balongdowo, Camat Candi, dan Bupati Sidoarjo. Kuasa Hukum Suparlan Djupri mengatakan pihaknya sudah meminta pelantikan



Sebanyak 80 kepala desa terpilih tetap akan dilantik sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni 29 Juni."

Agus Probo Sunarno
Kepala Dinas PMD Sidoarjo

kades terpilih ditunda pada bupati. Ada surat yang dikirim. "Masih gugatan. Sehingga, kami ingin pelantikan diundur," katanya.

Menurut Djupri, gugatan dilayangkan karena penetapan cakades terpilih dinilai cacat administrasi. Saat ditetapkan sebagai cakades, salah satu pendaftar belum mengundurkan diri. Hal itu membuat pelaksanaan pilkades tak adil.

**Kades Terpilih
Dilaporkan Polisi**

Selain di Balongdowo, muncul masalah lain terkait pilkades di Sidokepong. Cakades terpilih dilaporkan atas kasus penyerobotan tanah ke polisi. Saat ini, kasus itu masih ditangani aparat hukum.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo Agus Probo Sunarno mengatakan, hingga saat ini tidak ada perubahan jadwal pelantikan. "Sebanyak 80 kepala desa terpilih tetap akan dilantik sesuai tahapan yang telah ditetapkan yakni 29 Juni," katanya.

Menurutnya, berbagai upaya hukum yang muncul tidak memengaruhi agenda pelantikan. Probo menjelaskan, setiap keberatan terhadap hasil maupun proses Pilkades memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Pemkab menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. (ful/hen)

Jawa Pos

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal Rp 13,05 Miliar

Sidoarjo, Memorandum

Petugas gabungan Bea Cukai Sidoarjo, Satpol PP, serta sejumlah aparat penegak hukum (APH) memusnahkan barang bukti rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Sidoarjo, Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.

Kegiatan tersebut digelar di Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/6).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo HJ Mimik Idayana meminta aparat penegak hukum mengedepankan prinsip keadilan dalam memberantas peredaran rokok ilegal, khususnya terhadap masyarakat kecil yang hanya menjadi penjual eceran.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal melalui pengumpulan informasi, operasi pasar terpadu bersama Bea Cukai, Satpol PP, TNI, Polri, Forkopimda, serta sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita harus berani memberantas rokok ilegal, tetapi jangan sampai masyarakat kecil yang hanya menjual beberapa bungkus rokok menjadi korban. Mereka juga membutuhkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya," ujar Mimik.

Ia mengaku sering menemukan pedagang kecil yang tidak memahami aturan terkait legalitas produk rokok yang mereka jual. Karena itu, pemerintah diminta lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat mengetahui mana produk yang legal dan mana yang melanggar ketentuan cukai.

"Masyarakat perlu diberi pemahaman terlebih dahulu. Jangan langsung dilakukan tindakan tanpa sosialisasi yang memadai. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dan mencari solusi agar mereka tidak dirugikan," tegasnya.

Ia menambahkan, maraknya peredaran rokok ilegal di Sidoarjo menjadi persoalan serius yang mem-



Pemusnahan barang bukti rokok ilegal.

butuhkan penanganan bersama. Ia berharap ke depan upaya pemberantasan tidak hanya berfokus pada pedagang kecil, tetapi juga menyasar pelaku utama dalam rantai distribusi dan produksi rokok ilegal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Rudi Hery Kurniawan, menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

"Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 13,05 miliar. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp 8,8 miliar," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemusnahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan berlangsung di kawasan Sentra Industri Hasil Tembakau Candipari yang pembangunannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurutnya, penerapan cukai memiliki beberapa tujuan utama, yakni mengendalikan konsumsi rokok, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan perpajakan dan cukai.

"Produsen yang legal membayar cukai dan pajak sesuai aturan. Karena

itu, peredaran rokok ilegal tidak bisa dibiarkan karena merugikan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," jelasnya.

Ia menambahkan, sepanjang tahun 2026 hingga Juni, Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan 168 dokumen penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Penindakan dilakukan terhadap berbagai modus pelanggaran, mulai dari produksi ilegal, distribusi, penyimpanan di gudang, hingga peredaran di pasar dan jalur transportasi.

"Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Penindakan tidak hanya menyasar pedagang eceran, tetapi juga produsen dan jaringan distribusi rokok ilegal," katanya.

Meski demikian, Rudi mengakui bahwa penanganan persoalan rokok ilegal tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Menurutnya, diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif untuk memahami akar persoalan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal.

"Kami tetap mengedepankan langkah persuasif, khususnya kepada pedagang kecil, agar mereka tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Namun terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya. (adv/kri/jk/fer)